

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

A. Kajian Teori

1. Hakikat Kurikulum Pendidikan

Kurikulum adalah hal yang kompleks. Ia terdiri dari berbagai unsur di mana satu unsur berkaitan erat dengan unsur yang lain. Hubungan antara unsur atau komponen yang terdapat dalam kurikulum menjadikannya sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan hingga menjadi sistem. Setiap unsur dalam sistem kurikulum mempunyai tujuan. Pada hakikatnya tujuan tersebut adalah pendidikan.

Unsur yang membangun kurikulum adalah metode, media, teknik evaluasi, bahan ajar dan berbagai hal yang dirumuskan dalam proses pembelajaran, seperti lamanya waktu pembelajaran, kompetensi dan tujuan pembelajaran. Dalam sistem pendidikan nasional, dikenal sebuah kurikulum standar yang diterapkan dalam institusi lembaga pendidikan di Indonesia yang dikenal dengan nama Kurikulum Nasional (KURNAS). Untuk menilai penerapan kurikulum, dan hasil pembelajaran sebagai aplikasi dari kurikulum tersebut, diadakan evaluasi berkala yang dikenal dengan berbagai istilah yang berbeda-beda sesuai perkembangannya. Dahulu, evaluasi tersebut dikenal dengan istilah Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional, yang dalam perkembangannya berubah menjadi Ujian Akhir Nasional. Selain kurikulum inti, institusi pendidikan juga biasanya menerapkan satu kurikulum lain yang dikenal dengan kurikulum lokal. Penerapan kurikulum lokal menuntut lembaga pendidikan untuk mengajarkan mata pelajaran muatan lokal.¹

Term kurikulum diambil dari kata berbahasa Latin yakni “*Curriculum*” yang berarti “*a running course, or race course, especially a chariot race courser*” yang secara sederhana dapat diartikan sebagai

¹ Dzakir, *Perencanaan dan Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004) , h. 2.

pelajaran yang diajarkan. Istilah tersebut di atas digunakan untuk menunjukkan sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari seorang siswa untuk mencapai gelar atau mendapatkan ijazah. Secara tradisional kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan secara di sekolah-sekolah.²

Dalam bahasa Arab, kata *al-manhaj* digunakan untuk mewakili arti kurikulum yang berarti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap mereka.³ Selain itu kurikulum juga dipandang sebagai suatu program pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan.⁴

S. Nasution, dengan merujuk ke pendapat William Ragan menyatakan bahwa secara umum kurikulum meliputi seluruh program dan kehidupan di sekolah. Karena itu, kurikulum tidak saja mengatur mata pelajaran secara khusus, akan tetapi juga mengatur kehidupan di dalam kelas.

Dalam pengertiannya, terdapat berbagai penafsiran yang berbeda terhadap kurikulum, diantaranya: kurikulum sebagai produk. Dalam hal ini kurikulum dianggap sebagai hasil pengembangan dari kurikulum. Kurikulum juga dapat diartikan sebagai program yakni rencana yang ditempuh sekolah untuk mencapai tujuan. Penafsiran lain terhadap kurikulum adalah segala sesuatu yang diharapkan, dianggap akan dipelajari oleh siswa baik sikap dan ketrampilan tertentu). Selain itu, kurikulum juga dapat dianggap sebagai pengalaman siswa.⁵

Dja'far Siddik juga menegaskan bahwa dalam kurikulum, akan dijumpai bermacam-macam definisi, mulai dari yang tradisional atau pengertian yang lazim digunakan dikalangan umum/awam sampai pada

² S. Nasution, *Pengembangan kurikulum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993), h. 17.

³ Omar Mohammad al-Thoumy al-Sayabani, *Falsafah Pendidikan Islam*, terj. Hasan Langgulung (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 478.

⁴ Zakiah Darajat, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 122.

⁵ S. Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 5-9.

pengertian yang seluas-luasnya. Secara sederhana kurikulum didefinisikan sebagai mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Betapapun sederhananya definisi di atas akan tetapi definisi seperti itu masih banyak dianut oleh para pengelola pendidikan.⁶

Akan tetapi, meskipun berbagai definisi dan pengertian yang berbeda diberikan kepada kurikulum, pada dasarnya kurikulum bahwa kurikulum dipandang sebagai suatu rencana pelajaran (*a plan for learning*), artinya bahwa kurikulum tersebut disusun atau dirancang sedemikian rupa adalah untuk memperlancar proses belajar dan mengajar dalam bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan bersama-sama dengan tenaga kependidikannya.⁷

Meskipun para pemikir pendidikan berbeda dalam mendefinisikan kurikulum, akan tetapi mereka setuju bahwa pada hakekatnya kurikulum adalah suatu program pendidikan yang berisi berbagai bahan ajar dan pengalaman belajar yang diprogramkan, direncanakan dan dirancang secara sistematis atas dasar norma-norma yang berlaku yang dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi tenaga kependidikan dan peserta didik untuk mencapai tujuan

2. Komponen Kurikulum Pendidikan

Dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum, mengenal komponen kurikulum sangat penting. Komponen kurikulum adalah unsur-unsur yang membangun sebuah kurikulum. Dalam arti lain, komponen kurikulum adalah sesuatu yang harus ada dalam kurikulum.

Terdapat empat komponen pembangun kurikulum, yakni: tujuan, mata pelajaran, metode-organisasi dan evaluasi.⁸ Hampir serupa dengan hal tersebut, Nana Sukmadinata⁹ menyebutkan empat komponen kurikulum,

⁶ Dja'far Siddik, *Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam* (Bandung: Cipta Pustaka, 2006), h. 106.

⁷ Nasution, *Asas*, h. 5.

⁸ Hilda Taba, *Curriculum Development: Theory and Practice* (New York: Harcourt Brace & World, 1962), h. 25.

⁹ Nana Syaodih Sukmadinata, *Prinsip dan Landasan Pengembangan Kurikulum* (Jakarta: P2LPTK, 1988), h. 425.

yakni: tujuan, isi atau materi, proses atau sistem penyampaian serta evaluasi. Sejalan dengan hal tersebut, Dimiyati dan Mudjiono juga menyatakan empat komponen kurikulum yang terdiri-dari, tujuan, materi/pengalaman belajar, organisasi dan evaluasi.

a. Tujuan

Tujuan merupakan komponen kurikulum yang sangat penting. Tujuan menjadi arahan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum. Karena itu, segala materi pembelajaran yang direncanakan dalam kurikulum bertujuan untuk mencapai tujuan dari kurikulum.¹⁰

b. Materi Ajar

Kurikulum merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Karena itu, kurikulum dalam pendidikan formal berfungsi sebagai penyeleksi dan penyusun isi pembelajaran (materi/pengalaman belajar) agar keinginan tujuan kurikulum dapat dicapai dengan cara paling efektif dan supaya pengetahuan paling penting yang diinginkan pada jalurnya dapat disajikan secara efektif¹¹

c. Organisasi

Komponen ketika menuntut agar materi pembelajaran kurikulum disusun secara sistematis dan terorganisir. Keseluruhan dari organisasi materi pembelajaran dalam kurikulum harus berguna bagi tujuan pendidikan.¹²

d. Evaluasi

Komponen terakhir dalam kurikulum adalah evaluasi. Komponen evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar siswa serta efektivitas penerapan kurikulum dalam pembelajaran. Evaluasi menyediakan informasi tentang perkembangan belajar siswa maupun efektivitas kurikulum dan

¹⁰ R.S. Zais, *Curriculum Principles and Foundation* (New York: Harper and Row, 1976), h. 297.

¹¹ *Ibid.*

¹² Taba, *Curriculum*, h. 290.

pembelajaran, sehingga dapat dibuat keputusan-keputusan pembelajaran dan pendidikan secara tepat

3. Penyusunan Kurikulum

Dalam menyusun kurikulum, dikenal dua model utama dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum, yakni model administratif dan *grass root*.

a. Model Administratif

Model administratif berangkat dari anggapan bahwa penyusunan dan pengembangan kurikulum berasal atau merupakan tugas dari administrator pendidikan dan merupakan bagian dari proses administrasi. Yang dimaksud dengan administrator adalah pihak pengelola pendidikan. Dengan kewenangan yang ia miliki, administrator dapat membentuk tim untuk menyusun atau mengembangkan kurikulum. Tim yang dibentuk oleh administrator dapat terdiri dari pakar pendidikan atau praktisi. Arah pengembangan dan penerapan kurikulum ini bersifat *top-down* yakni dari tingkat yang lebih tinggi dalam hal ini administrator pendidikan kepada tingkat yang lebih rendah yakni guru di sekolah. Karena itu, pendekatan ini juga dikenal dengan nama *top-down*.

Kelemahan dari kurikulum yang disusun dan dikembangkan dengan model ini adalah tidak terpenuhinya tuntutan pendidikan dalam praktik yang nyata yakni di lembaga pendidikan, hal ini disebabkan inisiasi pengembangan bersumber dari atas. Model pengembangan kurikulum ini umumnya diterapkan dalam sistim pendidikan sentralisasi.

b. Model *Grass Root*

Kebalikan dari model pertama, disebut *grass roots* di mana inisiasi penyusunan dan pengembangan kurikulum datang dari tingkat bawah, yakni sekolah, dalam hal ini guru. Guru, secara bersama-sama dapat mengembangkan kurikulum, sebagian atau seluruhnya untuk menyesuaikan dengan tuntutan sosial pendidikan pada masa dan

tempat tertentu. Kurikulum yang dikembangkan dengan model pendekatan ini pada umumnya bersifat unik dan sangat tidak seragam. Karena itu, pada umumnya, model pendekatan ini diterapkan dalam sistem pendidikan desentralisasi.

Akan tetapi, meskipun ia bersifat unik dan khas, kurikulum yang dikembangkan oleh sebuah lembaga pendidikan dapat diterapkan pada lembaga lain dengan memperhatikan kepastian dan kesesuaian tuntutan sosial pendidikan di tempat tersebut.

Termasuk dari kurikulum yang dikembangkan menggunakan model ini adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Karena inisiasinya berasal dari bawah, maka KTSP, secara teoritis, mampu menjawab tuntutan sosial pendidikan di Indonesia.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurikulum

Terdapat perbedaan pendapat tentang faktor yang mempengaruhi penyusunan dan pengembangan kurikulum. Akan tetapi, pada umumnya, pengkaji pendidikan setuju bahwa masyarakat, teknologi dan budaya merupakan faktor utama yang mempengaruhi penyusunan dan pengembangan kurikulum. Berbeda dengan hal tersebut, menurut Sukmadinata,¹³ ada tiga faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yakni:

a. Perguruan Tinggi

Pengaruh perguruan tinggi terhadap pengembangan kurikulum dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkembangnya pengetahuan dan teknologi dalam lingkungan perguruan tinggi menuntut pengembangan kurikulum untuk tingkat pendidikan yang lebih rendah. Kedua, perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan keguruan. Semakin perguruan tinggi berhasil meningkatkan kualitas guru, semakin dinamis kurikulum yang berlaku, karena pada dasarnya guru adalah pelaksana sekaligus penilai kurikulum. Semakin dalam

¹³ Sukmadinata, *Prinsip*, h. 158.

pengetahuan guru soal kependidikan, semakin mudah ia menilai efektivitas kurikulum.

b. Masyarakat Sosial

Masyarakat sosial juga memberikan pengaruh besar dalam pengembangan kurikulum. Sekolah merupakan bagian dari sistem sosial masyarakat. Sekolah berubah sesuai tuntutan masyarakat. Perubahan tuntutan masyarakat terhadap sekolah, yang disebabkan oleh perubahan keadaan sosial, menyebabkan perubahan kurikulum. Perubahan

Kurikulum yang diterapkan di sekolah masyarakat yang homogen berbeda dengan kurikulum pada masyarakat heterogen. Perubahan dan perbedaan keadaan masyarakat menuntut perubahan dan pengembangan kurikulum.

c. Sistem Nilai

Faktor lain yang turut mempengaruhi pengembangan kurikulum adalah sistem nilai yang hidup dalam masyarakat. Sistem nilai, baik moral, agama, politik dan ekonomi harus diperhatikan dan menjadi bagian dari kurikulum pembelajaran. Karena pada dasarnya, pendidikan merupakan usaha untuk menanamkan nilai pada diri siswa.

Perubahan sistem nilai pada masyarakat juga menuntut pengembangan kurikulum dengan memasukkan sistem nilai yang baru. Semakin kompleks sistem nilai masyarakat, semakin rumit kurikulum yang digunakan dalam lembaga pendidikan.

5. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) (Kurikulum 2006)

Kurikulum pendidikan nasional telah banyak mengalami perkembangan dan perubahan sejak masa-masa awal kemerdekaan Indonesia. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum

nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945, perbedaannya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya.

Pada tahun 1947, kurikulum nasional yang digunakan disebut dengan *Rentjana Pelajaran 1947*. Pada saat itu, kurikulum pendidikan di Indonesia masih dipengaruhi sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang, sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. *Rentjana Pelajaran 1947* boleh dikatakan sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda. Karena suasana kehidupan berbangsa saat itu masih dalam semangat juang merebut kemerdekaan maka pendidikan sebagai *development conformism* lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia Indonesia yang merdeka dan berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini.

Kurikulum *Rentjana Pelajaran 1947* mengalami perubahan dan penyempurnaan dengan lahirnya kurikulum *Rentjana Pelajaran Terurai 1952*. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Yang paling menonjol dan sekaligus ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari.

Pada tahun 1964, kurikulum *Rentjana Pelajaran Terurai* dikembangkan dan disempurnakan hingga melahirkan kurikulum *Rentjana Pendidikan 1964*. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program *Pancawardhana* yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan, dan jasmani.¹⁴

Empat tahun kemudian, pada tahun 1968, upaya pengembangan kurikulum kembali melahirkan kurikulum baru yang disebut dengan *Rencana Pendidikan 1968*. Kurikulum 1968 merupakan pembaharuan dari

¹⁴ Hamalik, *Kurikulum...*, h. 51.

Kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dari segi tujuan pendidikan, Kurikulum 1968 bertujuan bahwa pendidikan ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan ketrampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan ketrampilan, serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat.

Pada tahun 1975, kurikulum Rencana Pendidikan mengalami perubahan sebagai akibat dari upaya pengembangan pendidikan yang terus menerus dilakukan. Ada beberapa hal-hal menonjol pada kurikulum tahun 1975 yang tidak terdapat pada kurikulum sebelumnya, seperti:

- a. Berorientasi pada tujuan;
- b. Menganut pendekatan integratif dalam arti bahwa setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif;
- c. Menekankan kepada efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu;
- d. Menganut pendekatan sistem instruksional yang dikenal dengan Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa;
- e. Dipengaruhi psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada *stimulus respon* (rangsangan-jawab) dan latihan (*drill*).

Karena perkembangan keadaan sosial-budaya, politik dan ekonomi di Indonesia, pada tahun 1983 muncul wacana ketertinggalan kurikulum tahun 1975 dan ketidak mampuannya untuk merespon kebutuhan sosial masyarakat Indonesia. Akhirnya, pada tahun 1984 disusun kurikulum baru

yang disebut dengan Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA). Ciri dari kurikulum CBSA adalah:

- a. Berorientasi pada tujuan instruksional;
- b. Pendekatan pembelajaran adalah berpusat pada anak didik;
- c. Pelaksanaan Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB);
- d. Materi pelajaran menggunakan pendekatan spiral, semakin tinggi tingkat kelas semakin banyak materi pelajaran yang dibebankan pada peserta didik;
- e. Menanamkan pengertian terlebih dahulu sebelum diberikan latihan. Konsep-konsep yang dipelajari siswa harus didasarkan kepada pengertian, baru kemudian diberikan latihan setelah mengerti. Untuk menunjang pengertian alat peraga sebagai media digunakan untuk membantu siswa memahami konsep yang dipelajarinya.

Pada tahun 1994, sebuah kurikulum hasil pengembangan dan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya lahir. Kurikulum ini mempunyai beberapa ciri, antara lain:

- a. Perubahan dari semester ke Caturwulan (Cawu);
- b. Perubahan dari pola pengajaran berorientasi teori menjadi muatan isi;
- c. Bersifat populis yaitu yang memberlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Kurikulum ini bersifat kurikulum inti sehingga daerah yang khusus dapat mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar;
- d. Dalam pelaksanaan kegiatan, guru hendaknya memilih dan menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Dalam mengaktifkan siswa guru dapat memberikan bentuk soal yang mengarah kepada jawaban *convergen*, *divergen* (terbuka, dimungkinkan lebih dari satu jawaban), dan penyelidikan.

Pada tahun 2004, lahir lagi kurikulum baru yang disebut dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi. Ciri dari kurikulum ini adalah:

- a. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal;
- b. Berorientasi pada hasil belajar (*learning outcomes*) dan keberagaman;
- c. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi;
- d. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif;
- e. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.

Setelah KBK dinyatakan tidak berhasil pada awal tahun 2006 ujicoba KBK dihentikan. Muncullah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa sehingga teknis evaluasi tidak lah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004.

Perbedaan yang paling menonjol dari KTSP adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah. Hal ini disebabkan kerangka dasar (KD), standar kompetensi kelulusan (SKL), standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.

KTSP lahir karena KBK masih sarat dengan beban belajar dan pemerintah pusat dalam hal ini Depdiknas masih dipandang terlalu intervensi dalam pengembangan kurikulum. Oleh karena itu, dalam KTSP beban belajar siswa sedikit berkurang dan tingkat satuan pendidikan (sekolah, guru dan komite sekolah) diberikan wewenang untuk mengembangkan kurikulum, seperti membuat indicator, silabus dan beberapa komponen kurikulum lainnya.

Dalam Lampiran Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 pada Bab II disebutkan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi serta panduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.
- b. Beragam dan terpadu.
- c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan.
- e. Menyeluruh dan berkesinambungan.
- f. Belajar sepanjang hayat.
- g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.¹⁵

Dalam pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan, pemerintah juga mematok prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kurikulum didasarkan pada potensi, perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini peserta didik harus mendapatkan pelayanan pendidikan yang bermutu, serta memperoleh kesempatan untuk mengekspresikan dirinya secara bebas, dinamis, dan menyenangkan.
- b. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar belajar, yaitu: (1) belajar untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (2) belajar untuk memahami dan menghayati, (3) belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, (4) belajar untuk hidup bersama dan berguna bagi orang lain, dan (5) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri, melalui proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.

¹⁵ Permendiknas No. 22, h. 6-7.

- c. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapat pelayanan yang bersifat perbaikan, pengayaan, dan/atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan, dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ke-Tuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral.
 - d. Kurikulum dilaksanakan dalam suasana hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai, akrab, terbuka, dan hangat, dengan prinsip *tut wuri handayani, ing madya mangun karsa, ing ngarsa sun tulada* (di belakang memberikan daya dan kekuatan, di tengah membangun semangat dan prakarsa, di depan memberikan contoh dan teladan).
 - e. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multi strategi dan multimedia, sumber belajar dan teknologi yang memadai, dan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dengan prinsip *a/am takambang jadi guru* (semua yang terjadi, tergelar dan berkembang di masyarakat dan lingkungan sekitar serta lingkungan alam semesta dijadikan sumber belajar, contoh, dan teladan).
 - f. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, social dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidikan dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal.
 - g. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi mata pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri diselenggarakan dalam keseimbangan, keterkaitan, dan kesinambungan yang cocok dan memadai antar kelas dan jenis serta jenjang pendidikan.¹⁶
- f. Komponen KTSP

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan terdiri dari beberapa komponen pembangun, mulai dari tujuan pendidikan, struktur dan muatan, kalender

¹⁶ *Ibid.*, h. 7-8.

pendidikan, silabus dan RPP. Komponen tersebut di atas dikelompokkan kepada 4 kelompok sebagai berikut:¹⁷

a. Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan

Tujuan pendidikan dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dirumuskan mengacu kepada tujuan pendidikan nasional yang dirumuskan secara bertingkat dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah kejuruan. Tujuan pendidikan menengah, termasuk di dalamnya madrasah tsanawiyah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

b. Struktur dan Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Struktur Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 terdiri dari:

- 1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia.
- 2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
- 3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 4) Kelompok mata pelajaran estetika.
- 5) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

Sedangkan muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan.

Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan terdiri dari:¹⁸

- 1) Mata Pelajaran
- 2) Muatan Lokal
- 3) Kegiatan Pengembangan Diri
- 4) Pengaturan Beban Belajar
- 5) Kenaikan Kelas, Penjurusan dan Kelulusan.
- 6) Pendidikan Kecakapan Hidup.

¹⁷ Mansur Muslich, *KTSP Dasar Pemahaman dan Pengembangan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 12.

¹⁸ *Ibid.*

7) Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global.

c. Kalender Pendidikan

Komponen ketiga dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kalender pendidikan. Sebagai bagian dari perencanaan, dalam KTSP disertakan kalender pendidikan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun ajaran.

d. Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Komponen keempat dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus menjadi acuan dalam menyusun dan mengembangkan RPP. RPP merupakan panduan paling rinci dan nyata dari rencana pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas.

g. Implementasi KTSP Dalam Sistem Pembelajaran

Implementasi adalah proses penerapan atau pelaksanaan ide, konsep atau kebijakan dalam tindakan nyata. Implementasi KTSP merupakan penerapan kurikulum tingkat satuan pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah sebagai sebuah kegiatan nyata dari pendidikan. Implementasi kurikulum juga dapat diartikan sebagai aktualisasi kurikulum tertulis (*written curriculum*) dalam bentuk pembelajaran.¹⁹

Menurut Mulyasa, ada tiga faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum dalam pembelajaran, yakni:²⁰

- a. Karakteristik dari kurikulum yang diterapkan, berhubungan dengan ide dan kejelasannya bagi guru yang menerapkannya. Faktor ini merupakan faktor intern kurikulum.
- b. Strategi yang digunakan dalam menerapkan kurikulum. Faktor ini merupakan faktor eksteren.

¹⁹ E. Mulyasa, *Implementasi KTSP Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), h. 178.

²⁰ *Ibid*, h, 180.

- c. Karakteristik pelaksana kurikulum juga mempengaruhi implementasi kurikulum. Karena Implementasi kurikulum pasti dipengaruhi oleh pengetahuan pelaksana terhadap kurikulum tersebut.

Guru merupakan tokoh penting dalam implemementasi KTS dalam pembelajaran. Guru, sebagai pelaksana KTSP dituntut untuk berpikir kreatif dalam mengembangkan kurikulum. Demikian pentingnya peran guru dalam Implementasi kurikulum, efektif atau tidaknya KTSP tergantung pada tindakan guru di kelas.²¹

Sebagai perwujudan dari kurikulum yang dapat merespon keberagaman kompetensi siswa, implementasi KTSP menghasilkan tindakan dan corak pembelajaran yang sangat beragam. Keberagaman tersebut ditentukan oleh wilayah dan tuntutan sosial pendidikan.

Dalam arahan KTSP, guru tidak bertindak sebagai pengajar yang bertugas mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa, akan tetapi sebagai motivator yang mendorong kegiatan belajar siswa, mediator yang menjadi media belajar siswa serta pembimbing dalam pencapaian kompetensi yang diharapkan.

KTSP juga menuntut tanggung jawab pendidikan tidak hanya kepada guru atau pihak sekolah, juga masyarakat. Hanya dengan bersinerginya ketiga unsur tersebut, KTSP dapat diterapkan dengan baik.

- h. Kebijakan Pembaharuan Kurikulum

Pendidikan merupakan elemen sebuah kebudayaan. Ia merupakan pilar yang menentukan kemajuan sebuah kebudayaan. Peradaban yang maju ditandai dengan kemajuan pendidikan. Sebaliknya, pendidikan yang baik berakibat pada kemajuan peradaban secara keseluruhan. Sebuah peradaban yang memberdayakan akan lahir dari suatu pola pendidikan dalam skala luas

²¹ Dzakir, *Perencanaan*, h. 20-21.

yang tepat guna dan efektif bagi konteks dan mampu menjawab segala tantangan zaman.²²

Pendidikan merupakan lembaga pembangun generasi penerus setiap bangsa. Karena itu, kualitas pendidikan menentukan kualitas generasinya. Dalam kata lain, pendidikan yang baik akan menghasilkan generasi yang baik dan menjadi penentu kemajuan bangsa.

Dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan, tentu banyak percobaan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang. Perubahan-perubahan dan percobaan tersebut tergambar dalam kurikulum yang digunakan dalam pendidikan. Perubahan keadaan sosio-budaya menuntut perubahan dan perbaikan kurikulum agar pendidikan dapat merespon tuntutan sosial-pendidikan. Kurikulum harus mampu membekali peserta didik dengan pengetahuan yang dapat merespon tuntutan zaman dan teknologi.²³

Kunandar, mengutip pernyataan Indra Djati Sidi, menyatakan bahwa salah satu usaha peningkatan mutu pendidikan adalah perbaikan kurikulum yakni membangun kurikulum yang: 1) mempunyai standar kemampuan dan ketrampilan siswa, 2) menerapkan konsep belajar tuntas, 3) meningkatkan sikap positif siswa seperti kreatif, inovatif dan mandiri.²⁴

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan dalam mengembangkan kurikulum, yakni:

- a. Keluwesan, kesederhanaan dan liabilitas
- b. Dapat menjadi pedoman pokok dalam pembelajaran
- c. Simultan
- d. Mempunyai standar
- e. Kesatuan bahwa setiap kurikulum merupakan bagian dari sistim pendidikan yang lebih besar, tidak terpisah dari kurikulum pada tingkat pendidikan di bawah atau di atasnya.

h. 5. ²² Abdullah Munir, *Menjadi Kepala Sekolah Efektif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008),

²³ Kunandar, *Guru*, h. 113.

²⁴ *Ibid.*, h. 114-116

- f. Unik dan dapat merespon keadaan siswa.
- g. Memperhatikan pendidikan di tingkat keluarga dan masyarakat.

Dalam peningkatan mutu pendidikan, kurikulum harus diperbaharui. Kebijakan pemerintah yang menetapkan KTSP sebagai kurikulum yang berlaku dalam sistem pendidikan nasional merupakan bagian dari pembaharuan kurikulum dan usaha peningkatan mutu pendidikan. KTSP merupakan pembaharuan dan perbaikan dari kurikulum yang diterapkan sebelumnya yakni, Kurikulum Berbasis Kompetensi.

Kebijakan pemerintah dalam perubahan kurikulum dan penentuan KTSP sebagai kurikulum yang digunakan tentu didasarkan atas alasan-alasan tertentu. Menurut Kunandar, ada beberapa alasan yang menjadi dasar penetapan penerapan KTSP, yakni:²⁵

- a. Perbedaan potensi siswa. Dalam hal hal ini KTSP diharapkan dapat merespon lebih baik perbedaan potensi yang beragam dibandingkan KBK
 - b. Rendahnya mutu pendidikan yang berlangsung selama ini. Di sisi lain, KBK juga belum memperhatikan aspek moral, akhlak, budi pekerti dan seni.
 - c. Meningkatnya persaingan global. Dengan meningkatnya persaingan global, potensi anak yang bervariasi sedapat mungkin harus ditanggapi oleh pendidikan dengan cara yang lebih variatif.
 - d. Meningkatnya persaingan lembaga pendidikan.
- i. Landasan Pengembangan KTSP

Pemberlakuan KTSP didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

KTSP mulai disusun oleh sekolah pada tahun ajaran 2007/2008 dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan

²⁵ *Ibid.*, h. 122.

melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional masing-masing Nomor 22 Tahun 2006 dan Nomor 23 Tahun 2006, serta Panduan Pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).²⁶

Pada hakekatnya, KTSP tidak dapat dipisahkan dari standar isi, akan tetapi pengembangannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Karena itu, pengembangan KTSP diamanatkan kepada lembaga penyelenggara pendidikan, yakni sekolah. Pelaksanaan KTSP mengacu pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan.

Pemberlakuan KTSP, sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, ditetapkan oleh kepala sekolah setelah memperhatikan pertimbangan dari komite sekolah. Dengan kata lain, pemberlakuan KTSP sepenuhnya diserahkan kepada sekolah, dalam arti tidak ada intervensi dari Dinas Pendidikan atau Departemen Pendidikan Nasional. Penyusunan KTSP selain melibatkan guru dan karyawan juga melibatkan komite sekolah serta bila perlu para ahli dari perguruan tinggi setempat. Dengan keterlibatan komite sekolah dalam penyusunan KTSP maka KTSP yang disusun akan sesuai dengan aspirasi, masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

Secara ringkas, landasan KTSP adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tentang Standar Kompetensi Lulusan

²⁶ E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 17.

²⁷ *Ibid*, h. 20.

- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23 Tahun 2006.

j. Prinsip dan Acuan Pengembangan KTSP

Dalam mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, ada beberapa prinsip yang harus dipegang teguh oleh unit satuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan KTSP merespon peserta didik, variasi, relevansi, kesinambungan dan keseimbangan. Bila dijabarkan lebih lanjut, prinsip tersebut terdiri dari:

- a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya.

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut, pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Oleh karena peserta didik memiliki posisi sentral, maka kegiatan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Implikasi dari prinsip ini adalah: kurikulum disusun untuk melayani kebutuhan peserta didik dan tidak boleh memberatkan peserta didik. Kurikulum dirancang semata-mata untuk kepentingan memaksimalkan potensi peserta didik. Menambah jam pelajaran tidak boleh terlalu banyak sehingga memberatkan peserta didik yang dampaknya peserta didik tidak memiliki banyak waktu untuk melakukan kegiatan lain. Kurikulum juga harus merencanakan layanan konseling untuk membantu perkembangan peserta didik secara terprogram agar peserta didik dapat tumbuh kembang secara maksimal sesuai dengan perkembangan kejiwaannya.

b. Beragam dan Terpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan jender. Kurikulum disusun agar memungkinkan pengembangan keragaman potensi, minat, kecerdasan intelektual, emosional, spritual, dan kinestetik peserta didik secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.

Keragaman berimplikasi pada keluwesan kurikulum. Analisis keragaman peserta didik dari segi kemampuan, minat, dan bakat, perlu dilakukan untuk merancang model pembelajaran yang sesuai, jenis pengembangan diri yang beragam, serta program remedial yang sesuai. Selain itu, keragaman juga berkaitan dengan kekhasan dan kebutuhan yang berbeda tiap daerah sehingga kurikulum perlu disesuaikan dengan hasil analisis potensi kawasan. Ciri khas karakteristik jenis pendidikan perlu dipertimbangkan dalam merancang struktur dan muatan kurikulum. Demikian juga karakteristik satuan pendidikan yang berbeda perlu menyusun struktur dan muatan kurikulum yang relatif beragam disesuaikan dengan karakteristik yang dimiliki.

Selanjutnya, makna terpadu berkaitan dengan rancangan kurikulum harus meliputi substansi komponen muatan wajib kurikulum, muatan lokal, dan pengembangan diri secara terpadu, serta disusun dalam keterkaitan dan kesinambungan yang bermakna. Selain itu, keterpaduan juga berkaitan dengan keterpaduan program yang mendukung pelaksanaan kurikulum. Misalnya, pada madrasah yang berasrama perlu dirancang kegiatan suplemen secara terpadu untuk mendukung pelaksanaan kurikulum di madrasah.

- c. Tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni berkembang secara dinamis. Artinya, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Isi/ muatan kurikulum dapat dipertanggung-jawabkan dan relevan dengan perkembangan iptek dan seni. Rancangan pembelajaran mengacu pada perkembangan ilmu belajar yang mutakhir. Bimbingan konseling dimaksimalkan dengan mengacu pada perkembangan ilmu yang relevan. Isi kurikulum juga harus berkaitan dengan perkembangan teknologi. Misalnya, memasukkan mata pelajaran TIK dalam struktur dan muatan kurikulum. Menggunakan internet sebagai sumber belajar. Menggunakan model belajar dengan membiasakan peserta didik mengenal teknologi sehingga peserta didik siap bersentuhan dengan teknologi. Implikasinya, terus diupayakan perbaikan isi dan cara implementasi kurikulum dengan perkembangan iptek dan seni. Kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

- d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan.

Kurikulum harus memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan kebutuhan dunia kerja, khususnya bagi mereka yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir,

keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional merupakan keniscayaan. Pada tataran perencanaan, prinsip ini berkaitan dengan pelibatan pemangku kebijakan dalam penyusunan kurikulum, analisis konteks kebutuhan daerah, dan analisis *life skill* untuk dimasukkan pada rancangan kurikulum. Pengintegrasian kecakapan hidup perlu dirancang karena akan diperlukan peserta didik dalam kehidupan mereka.

Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh-kembangnya pribadi peserta didik yang berjiwa kewira usahaan dan mempunyai kecakapan hidup, oleh sebab itu kurikulum perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja. Hal ini sangat penting untuk membekali peserta didik yang tidak dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

e. Menyeluruh dan berkesinambungan.

Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi, bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antarsemua jenjang pendidikan. Aplikasi prinsip ini pada tataran pengembangan KTSP (dokumen 1), mencerminkan kesinambungan antar-kelas dan cakupan secara menyeluruh muatan wajib, muatan lokal, maupun pengembangan diri. Pada tataran pengembangan silabus, pemetaan KD mencerminkan kesinambungan dan kekomprehensifan cakupan kompetensi. Misalnya, perlu dirancang pemetaan yang dapat menunjukkan bahwa isi kompetensi dasar yang dikembangkan berisi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang ditekankan pada tiap-tiap KD. Menyeluruh juga berarti isi kurikulum menyiapkan manusia Indonesia secara utuh.

f. Belajar sepanjang hayat.

Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-

unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya. Keterkaitan unsur pendidikan formal di madrasah dan informal di asrama. Semuanya dilakukan untuk membentuk manusia seutuhnya. Berbagai kegiatan perlu dirancang agar peserta didik senang belajar dan termotivasi untuk belajar sepanjang hayat. Isi kurikulum merancang kegiatan yang menyiapkan peserta didik akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Misalnya, merangsang budaya baca, merangsang motivasi untuk terus belajar dengan cara merancang model-model pembelajaran yang bisa membuat peserta didik senang belajar sehingga dia akan mempunyai keinginan belajar terus sepanjang hayatnya (Muatan khusus yang bisa berdampak untuk membentuk pembelajaran sepanjang hayat, misalnya muatan khusus wajib baca).

- g. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.²⁸

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Daerah memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan, dan keragaman karakteristik lingkungan. Oleh karena itu, kurikulum harus memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan daerah. Kondisi tersebut harus diimbangi dengan isi kurikulum yang membentuk kesadaran peserta didik sebagai warga negara dalam kerangka NKRI.

²⁸ Mansur Muslich, *KTSP Dasar Pemahaman dan Pengembangan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 11.

Kepentingan pusat diwakili oleh struktur kurikulum minimal, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar minimal yang telah diatur pusat. Untuk itu, pengembangan yang berorientasi pada karakteristik daerah dan kekhasan satuan pendidikan tidak boleh mengorbankan standar minimal yang telah ditetapkan oleh pusat. Madrasah bisa menambahkan hal lain secara seimbang untuk kepentingan daerah/kekhasan karakteristik jenis pendidikan. Misalnya, penambahan jam pelajaran agama di madrasah yang berbasis agama tidak boleh mengorbankan jam minimal yang telah ditetapkan.

Selain prinsip tersebut di atas, pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan juga harus mengacu kepada acuan operasional yang ditentukan. Untuk mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, unit satuan pendidikan harus mengacu kepada:²⁹

- a. Peningkatan Iman dan takwa serta akhlak mulia.

Sebagai negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia menjadi acuan penting dalam mengembangkan pendidikan, dalam hal ini Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Iman dan takwa serta akhlak mulia merupakan bentuk dari identitas yang diharapkan dari pribadi para peserta didik. Kurikulum disusun yang memungkinkan semua mata pelajaran dapat membantu peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia peserta didik.

- b. Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik.

Acuan ini menginginkan agar pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan selalu memperhatikan siswa sebagai subjek pendidikan.

- c. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan.

Daerah memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan dan keragaman karakteristik lingkungan. Oleh karena itu, kurikulum harus

²⁹ *Ibid.*

memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan daerah.

d. Tuntutan pembangunan daerah dan nasional

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan kepentingan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan kepentingan daerah harus saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan motto Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Daerah memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan, dan keragaman karakteristik lingkungan. Oleh karena itu, kurikulum harus memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan daerah. Kondisi tersebut harus diimbangi dengan isi kurikulum yang membentuk kesadaran peserta didik sebagai warga negara dalam kerangka NKRI.

Kepentingan pusat diwakili oleh struktur kurikulum minimal, Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar minimal yang telah diatur pusat. Untuk itu, pengembangan yang berorientasi pada karakteristik daerah dan kekhasan satuan pendidikan tidak boleh mengorbankan standar minimal yang telah ditetapkan oleh pusat. Madrasah bisa menambahkan hal lain secara seimbang untuk kepentingan daerah/kekhasan karakteristik jenis pendidikan. Misalnya, penambahan jam pelajaran agama di madrasah yang berbasis agama tidak boleh mengorbankan jam minimal yang telah ditetapkan.

e. Tuntutan dunia kerja.

Kurikulum harus memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dan kebutuhan dunia kerja, khusus bagi mereka yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

f. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

g. Agama.

Isi dan muatan kurikulum harus bisa mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan yang ada. Perbedaan itu dapat berupa perbedaan agama, ras, suku/budaya, aliran, jenis kelamin dan sebagainya. Muatan kurikulum harus dirancang agar dapat mengembangkan toleransi dan kerukunan umat beragama, toleran terhadap perbedaan ras, suku/budaya, aliran, jenis kelamin, dan sebagainya. Hal ini sesuai dengan kondisi Indonesia yang memang majemuk dalam berbagai hal. Rancangan pengembangan nilai-nilai tersebut dapat melalui pengintegrasian kecakapan hidup terutama ketrampilan sosial ke dalam mata pelajaran. Pengembangan diri juga dapat dirancang untuk melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki toleransi yang tinggi terhadap perbedaan serta dapat hidup bersama dalam berbagai perbedaan.

h. Dinamika perkembangan global.

Kurikulum harus dikembangkan agar peserta didik mampu bersaing secara global dan dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain. Kurikulum perlu merancang struktur dan isi yang membekali peserta didik dapat bersaing di dunia internasional dan mampu berdampingan dengan bangsa lain. Kurikulum harus terus dievaluasi untuk selalu disesuaikan dengan perkembangan global.

i. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Meskipun daerah diberi kewenangan mengatur, semua muatan kurikulum hendaknya dirancang agar berdampak pada terwujudnya persatuan nasional dan nilai kebangsaan. Madrasah di bawah yayasan keagamaan tidak boleh merancang muatan kurikulum yang menanamkan fanatisme daerah atau fanatisme aliran sehingga

merusak nilai-nilai kebangsaan. Pengembangan diri yang dirancang juga mengacu pada nilai-nilai kebangsaan dan patriotisme. Misalnya: upacara, PASKIBRA, peringatan hari-hari besar nasional, dan sebagainya

j. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Kurikulum dimulai dari yang paling dekat. Analisis konteks sosial budaya masyarakat penting dilakukan agar madrasah mengetahui harapan masyarakat sekitar, nilai-nilai yang dianut dan juga keadaan sosial ekonomi. Dengan diketahuinya konteks sosial, madrasah dapat merancang kurikulum yang tepat. Misalnya, jika rata-rata peserta didik berasal dari keluarga miskin, perlu dibekali pembelajaran yang membuat dia mandiri dengan keterampilan yang relevan.

k. Kesetaraan gender.

Kurikulum yang dikembangkan memberi akses, mendorong partisipasi, memberi perlakuan yang menggambarkan kesetaraan, dan memberikan manfaat yang sama bagi peserta didik-siswi. Dalam hal ini diharapkan struktur dan muatan isi kurikulum tidak *stereotype* (memberi label-label khusus). Misalnya, mulok untuk menjahit perempuan, mulok elektronika hanya untuk laki-laki). Demikian juga bahan ajar yang dikembangkan dari tiap-tiap mata pelajaran hendaknya dapat menanamkan persepsi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya, tidak menanamkan persepsi bahwa laki-laki layak menduduki jabatan tertentu, sedangkan wanita hanya cocok menduduki jabatan tertentu. Kurikulum dianggap memiliki kesetaraan jender jika tidak memberi *stereotype* perempuan atau laki-laki. Pengelolaan mulok perlu membuka akses bahwa semua jenis mulok dapat dipilih oleh anak laki-laki dan perempuan.

Secara operasional penyusunan KTSP adalah mengacu pada Standar Isi (SI), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Proses, dan Standar Penilaian yang telah ditetapkan dalam Permendiknas No.

20, 22, 23 tahun 2006 dan Permen 41 tahun 2008). Dan untuk madrasah baik itu Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah maupun Madrasah Aliyah, Menteri Agama telah mengeluarkan Permenag No. 2 th 2008 tentang Standar isi dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk satuan pendidikan dasar dan menengah di madrasah. Standar isi ini mengatur tentang: (a) kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam penyusunan KTSP, (b) beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah, (c) komponen KTSP yang akan dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan panduan penyusunan kurikulum sebagai bagian tidak terpisahkan dari Standar Isi, dan (d) kalender pendidikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

1. Karakteristik satuan pendidikan

Kurikulum harus dikembangkan sesuai dengan visi, misi, tujuan, kondisi, dan ciri khas satuan pendidikan. Karakteristik satuan pendidikan memiliki harapan, kondisi madrasah/madrasah, kondisi peserta didik, dan ciri khas yang membedakan dengan satuan pendidikan satu dengan yang lain. Sesuai dengan prinsip ini, madrasah dengan visi tertentu dapat mengembangkan struktur dan muatan kurikulum yang sesuai. Misalnya, madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang juga berfungsi sebagai lembaga pengembangan dakwah dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga pendidikan Islam, madrasah tidak hanya diarahkan pada kegiatan penggalan ilmu pengetahuan semata, tetapi juga menjadi wahana “pelatihan” untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan pada tataran realitas. Selain itu, pendidikan di madrasah tidak hanya mengarah pada keunggulan akademis (*academic excellence*), tetapi justru menegaskan pada orientasi pembentukan karakter (*character building*) yang berasaskan pada prinsip *akhlaq al-karimah*. Sebagai lembaga pengembangan dakwah, madrasah dengan sendirinya menjadi salah

satu guru syiar agama dan penyebaran ajaran agama sekaligus tampil sebagai komponen penting dari gerakan *amar ma'ruf nahi munkar*.

Sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat, madrasah berperan dalam pengembangan masyarakat sekitar terutama terkait dengan masalah keagamaan maupun pemberdayaan sektor nonkeagamaan. Ini justru menjadi ciri madrasah karena ia lebih merupakan pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*). Dengan demikian salah satu komponen penting dari sistem madrasah adalah peran aktifnya dalam pemberdayaan masyarakat sekitar dan sebaliknya peran aktif masyarakat dalam pengembangan madrasah sangat penting juga (*mutual support*).

k. Silabus

a. Definisi

Dalam ilmu pendidikan, istilah silabus mengacu kepada garis besar atau ringkasan atau pokok-pokok isi suatu materi pelajaran. Silabus merupakan penerjemahan dari kurikulum. Kurikulum menentukan standar kompetensi dan dasar kompetensi, sedangkan silabus mempersiapkan materi yang dapat mengantarkan siswa kepada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditentukan oleh kurikulum. Dalam silabus dicantumkan SK, KD dan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar.

Silabus berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam mengembangkan proses pembelajaran lebih lanjut. Karena itu, silabus menjadi panduan dalam merumuskan rencana pembelajaran dan mengelola kegiatan pembelajaran.

b. Prinsip Penyusunan Silabus

Ada beberapa kriteria yang harus diikuti dalam menyusun silabus, untuk menghasilkan silabus yang baik, yakni:³⁰

1) Ilmiah

Kriteria ilmiah berhubungan dengan materi pelajaran yang dirangkum dalam silabus. Uraian-uraian materi pembelajaran harus ilmiah, dalam arti dapat dipertanggungjawabkan dalam ilmu pengetahuan. Karena itu, materi pembelajaran dalam silabus harus dirujuk kepada buku ilmiah, bukan sembarangan literatur.

Selain itu, keilmiahan sebagai kriteria silabus juga berhubungan dengan proses pembelajaran yang harus memperhatikan prinsip-prinsip dan teori pembelajaran.

2) Relevan

Kriteria relevan berhubungan dengan kesesuaian antara tingkat kesulitan materi pembelajaran dengan kemampuan siswa yang mempelajarinya. Tingkat kesukaran tidak hanya diukur berdasarkan kemampuan intelektual, juga fisik, psikis dan emosional siswa.

3) Sistematis

Sistimatis berarti seluruh materi pembelajaran merupakan satu kesatuan yang saling yang terorganisir dalam mengantarkan siswa kepada kompetensi yang diinginkan oleh kurikulum. Baik, SK, KD, indikator dan materi pembelajaran yang dirumuskan dalam silabus saling berfungsi secara sistematis dan berhubungan antara satu dengan yang lain.

4) Konsisten

Sedangkan konsistensi merujuk kepada hubungan antara KD, SK, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, teknik dan instrumen penilaian yang taat asas, tidak berubah-berubah. Keseluruhannya

³⁰ *Ibid.* Lihat juga Tim PEKERTI-AA PPSP LPP, *Panduan Penyusunan Silabus dan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran* (Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan, 2007), h. 7-27.

komponen dalam silabus saling berhubungan dan bertujuan untuk mengantarkan siswa kepada pencapaian kompetensi yang diharapkan.

5) Memadai

Memadai juga berhubungan dengan kesesuaian antara materi pelajaran dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang diinginkan. Artinya, materi pelajaran yang dirangkum dalam silabus harus mampu mengantarkan siswa mencapai kompetensi tersebut.

6) Aktual dan Kontekstual

Kriteria aktualitas dan kontekstualitas berhubungan dengan indikator, materi, pengalaman, sumber belajar dan sistim penilaian yang memperhatikan aspek perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, keadaan lingkungan sosial dan tuntutan ilmu pengetahuan. Kriteria ini diperlukan untuk menjaga siswa dari keterbelakangan informasi dan keterangsingan siswa dari lingkungan sosialnya.

7) Fleksibel

Kriteria fleksibel juga berhubungan dengan universalitas dalam arti silabus memperhatikan keberagaman siswa, guru, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat. Silabus harus fleksibel yakni menyesuaikan dirinya dengan keberagaman hal-hal tersebut di atas.

8) Menyeluruh

Silabus harus memperhatikan aspek siswa secara menyeluruh, baik perkembangan kognitif, afektif dan psikomotorik. Penyusunan materi pembelajaran dan pengembangannya ditujukan untuk mengembangkan ketiga aspek tersebut di atas secara menyeluruh dan seimbang. Karena itu, silabus yang baik tidak memperhatikan salah satu aspek dan mengabaikan aspek yang lain.

c. Unit Waktu Silabus

Silabus mata pelajaran disusun dan dikembangkan dengan mempertimbangkan ketersediaan waktu untuk seluruh mata pelajaran

selama penyelenggaraan pendidikan. Pertimbangan atas perencanaan waktu berhubungan dengan alokasi waktu pembelajaran per hari, persemester dan pertahun. Hanya dengan memperhatikan unit waktu, silabus dapat diterapkan dalam praktik pembelajaran.

d. Komponen Silabus

Seperti diuraikan sebelumnya, silabus merupakan penerjemahan lanjutan dari kurikulum. Silabus berusaha untuk menjawab tiga pertanyaan dasar dalam pembelajaran, yakni:

- 1) Kompetensi apa dicanangkan untuk dikuasai oleh siswa?
- 2) Bagaimana mengantarkan siswa untuk mencapai kompetensi tersebut?
- 3) Bagaimana mengetahui tingkat pencapaian siswa atas kompetensi tersebut?

Pertanyaan pertama mengharuskan silabus mencantumkan standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Dengan demikian, hal-hal tersebut di atas menjadi bagian dari komponen kurikulum.

Pertanyaan kedua berhubungan dengan pendekatan, strategi, metode, media, materi yang digunakan dalam pembelajaran. Karena itu, silabus harus mencantumkan hal-hal tersebut di atas sebagai bagian dari komponen silabus.

Pertanyaan ketiga menentukan silabus harus mencantumkan teknik dan instrumen yang digunakan untuk mengetahui pencapaian siswa atas kompetensi yang ditentukan pada bagian awal silabus. Karena itu, teknik penilaian juga merupakan bagian dari komponen silabus.

Berdasarkan uraian tersebut, silabus terdiri dari komponen-komponen berikut:³¹

- 1) Kelompok kompetensi
 - a) Standar kompetensi

³¹ Muslich, *KTSP*, h. 27.

- b) Kompetensi Dasar
- c) Indikator
- 2) Fasilitas penguasaan kompetensi
 - 1) Materi pembelajaran
 - 2) Strategi pembelajaran
 - 3) Sumber belajar
 - 4) Alokasi waktu
- 3) Cara mengetahui pencapaian kompetensi
 - 1) Teknik penilaian (jenis dan bentuk)
 - 2) Instrumen penilaian
- e. Langkah Penyusunan dan Pengembangan Silabus

Dalam menyusun dan mengembangkan silabus ada beberapa langkah teknik yang harus diikuti. Langkah-langkah tersebut dirumuskan dari komponen-komponen silabus. Berikut adalah langkah dalam menyusun dan mengembangkan silabus:³²

1) Mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Dalam mengkaji dan merumuskan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, seorang guru harus mengikuti ketentuan Standar Isi dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Berurutan berdasarkan hirarki konsep disiplin ilmu dan tingkat kesulitan materi.
 - b) Keterkaitan antara Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam mata pelajaran.
 - c) Keterkaitan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar antar pelajaran.
- 2) Mengidentifikasi materi pokok.

Untuk menentukan materi pokok yang menunjang pencapaian Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, guru harus mempertimbangkan hal-hal berikut:

³² *Ibid.*, h. 28-30.

- a) Tingkat perkembangan peserta didik, baik fisik, intelektual, emosional, sosial maupun spiritual.
 - b) Manfaatnya bagi peserta didik.
 - c) Struktur keilmuan.
 - d) Kedalaman dan keluasan materi.
 - e) Relevansi dan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan.
 - f) Alokasi waktu.
- 3) Mengembangkan pengalaman belajar.

Pengalaman belajar merupakan kegiatan baik mental dan fisik dalam pembelajaran ketika berinteraksi dengan sumber belajar. Pengalaman belajar adalah hal-hal yang dialami peserta didik ketika membaca buku, mendengarkan penjelasan guru, memperagakan tindakan atau mengamati media pembelajaran dan sebagainya. Pengalaman belajar harus didesain sedemikian rupa agar dapat menunjang pencapaian indikator keberhasilan pembelajaran yang dirumuskan dalam silabus.

- 4) Merumuskan indikator keberhasilan belajar.

Indikator merupakan penjabaran dari Kompetensi Dasar yang menunjukkan tanda-tanda, perbuatan atau respon yang dilakukan atau ditampilkan oleh siswa. Kata kerja yang digunakan sebagai indikator selalu lebih khusus dan sempit dibandingkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar.

- 5) Menentukan jenis penilaian.

Penilaian diperlukan untuk menentukan keberhasilan pembelajaran. Hal yang dinilai dalam penilaian disesuaikan dengan indikator. Karena itu, penilaian harus menuntut siswa melakukan atau menunjukkan sesuatu sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi pembelajaran.

6) Menentukan alokasi waktu.

Penentuan alokasi waktu pada setiap Kompetensi Dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran perminggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasaan, kedalaman, tingkat kesulitan dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk menguasai Kompetensi Dasar.

7) Menentukan sumber belajar.

Sumber belajar adalah rujukan atau objek atau bahan yang digunakan selama kegiatan pembelajaran. Sumber belajar terdiri dari media cetak, media elektronik, narasumber, lingkungan fisik, alam dan sosial-budaya.

12. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah rancangan pembelajaran mata pelajaran per unit yang akan diterapkan guru dalam pembelajaran di dalam kelas.³³ Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan program bagaimana proses pembelajaran berlangsung di dalam kelas dengan terencana dan terkendali. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan panduan paling rinci bagi sebuah guru dalam melaksanakan pembelajaran di dalam kelas.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari Silabus. Sejalan dengan hal tersebut, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran disusun dan dikembangkan sesuai dengan petunjuk silabus. Selain itu, karena Rencana Pelaksanaan Pembelajaran disusun dan dikembangkan berdasarkan silabus, pada dasarnya komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tidak berbeda dengan komponen silabus. Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran terdiri dari:³⁴

³³ *Ibid.*, h. 45.

³⁴ *Ibid.*, h. 47.

a. Identitas

Identitas yang dicantumkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran terdiri dari satuan pendidikan (identitas sekolah), mata pelajaran, kelas dan semester dan guru pengajar.

b. Standar Kompetensi

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang dicantumkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran tidak berbeda dengan Standar Kompetensi yang dirumuskan dalam Silabus.

c. Kompetensi Dasar

d. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan rumusan tujuan yang ingin dicapai oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan sesuai dengan Kompetensi Dasar pembelajaran.

e. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran yang dicantumkan dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan materi yang dirumuskan dalam Silabus. Untuk itu, buku yang berisi materi pembelajaran menjadi sumber belajar paling pokok dalam pembelajaran.

f. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan identifikasi terhadap model kegiatan pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas.

g. Uraian Langkah Pembelajaran

Metode pembelajaran kemudian diuraikan lebih lanjut atau diterjemahkan secara rinci ke dalam langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran dikelompokkan kepada tiga kelompok yakni, pendahuluan, isi dan penutup.

h. Sumber Belajar

Sumber belajar adalah sesuatu yang darinya siswa mendapatkan materi pembelajaran. Sumber belajar telah

dirumuskan sebelum penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yakni dalam Silabus.

i. Teknik Penilaian

Teknik penilaian juga telah dirumuskan dalam Silabus sebelum Rencana Pelaksanaan Pembelajaran disusun. Karena itu, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran menjabarkan dan menguraikan teknik penilaian dalam silabus.

j. Pengesahan

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang belum ditandatangani oleh guru pengajar mata pelajaran yang direncanakan dalam Silabus dan belum disetujui oleh kepala sekolah merupakan draft RPP. Draft ini menjadi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang sah setelah guru mata pelajaran dan kepala sekolah menandatangani.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang kurikulum secara umum pernah dilakukan peneliti-peneliti lain sebelumnya, seperti:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Marzuki pada tahun 2008 yang berjudul *Implementasi Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Langsa*, dalam bentuk tesis di PPS IAIN SU pada tahun 2008. Penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kurikulum yang baik menghasilkan peningkatan mutu pendidikan seperti ditemukan pada MAN 1 Kota Langsa.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Khadijah yang berjudul *Implementasi Pembelajaran Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri 2 Medan*, juga dalam bentuk tesis di PPS IAIN SU pada tahun 2002. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kurikulum telah diimplementasikan dengan baik dalam pembelajaran di MAN 2 Medan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Soiman yang berjudul *Analisis Kurikulum dan Metode Pendidikan Islam Ittihadiyah Sumatera Utara*,

sebagai tesis di PPS IAIN SU pada tahun 2006. Isi dari penelitian ini adalah menggambarkan sebuah model kurikulum yang unik yang digunakan sebagai dasar dan acuan pendidikan dan pembelajaran di madrasah Ittihadiyah.